

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era Otonomi Daerah sasaran dan tujuan pembangunan salah satu diantaranya adalah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, dan ini dapat mudah dicapai dengan memperhatikan potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sejalan dengan tujuan pembangunan ini pelaksanaannya ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian 2006).

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 pendelegasian tugas dan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi juga efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya keuangan. Dengan demikian diperlukan suatu laporan keuangan yang baik, transparan, memiliki akuntabilitas yang akurat dan dapat dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah berikut dengan analisis prestasi pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri (Bastian 2001:6). Keadaan ini diharapkan agar daerah yang memiliki kekuasaan otonomi diharapkan juga mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya yaitu

terletak pada strategi sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan di bidang keuangan daerah (Soedjono 2000).

Di dalam menyelenggarakan pembangunan dengan kekuasaan Otonomi Daerah Kabupaten Way Kanan harus juga memperhatikan kemampuan keuangan daerahnya. Menurut pasal 6 UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu :
  - 1) Pajak daerah;
  - 2) Retribusi daerah;
  - 3) Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
  - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sejak berdirinya pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan dan sekaligus memasuki era otonomi daerah, perkembangan perekonomian Kabupaten Way Kanan bertumpu pada kegiatan pertanian sebagai sektor basis dan berperan sebagai andalan sesuai dengan dukungan kondisi lahan dan budaya masyarakatnya. Sedangkan dalam jangka panjang, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan lahan sumber daya manusia, sumber daya finansial dan banyaknya lahan pertanian yang masuk sebagai daerah marginal, sehingga pengembangannya diarahkan pada jenis usaha pertanian yang bersifat intensifikasi, terutama pertanian tanaman perkebunan dan pertanian lahan basah (irigasi). Laju pertumbuhan sektor pertanian diperkirakan mencapai 4 % per tahun.

Pertumbuhan perekonomian pada lima tahun pertama hingga tahun 2009 diperkirakan 7 % per tahun dengan mengembangkan sektor sekunder yang mengolah hasil pertanian. Pertumbuhan industri pengolahan hasil pertanian Kabupaten Way Kanan didorong oleh berkembangnya investasi yang mengelola usaha hasil pertanian perkebunan maupun hasil tanaman hortikultura lainnya. Pada tahap ini, sektor industri berkembang dengan laju pertumbuhan sebesar 17.55 % per tahun dan memberikan kontribusi sebesar 16% terhadap PDRB Kabupaten Way Kanan, sedangkan sektor pertanian tumbuh dengan laju sebesar 1,73 % per tahun dan memberikan kontribusi sebesar 40 % terhadap PDRB Way Kanan.

Kemajuan usaha masyarakat dan sektor usaha BUMN pada sektor perkebunan mengutamakan pengembangan perkebunan rakyat. Luas lahan perkebunan rakyat secara keseluruhan diperkirakan mencapai 50.662 Ha, dengan produktivitas rata-rata 0,75 ton/ha. Jenis komoditi yang dikembangkan adalah karet, lada, kakao, dan kopi. Sedangkan berdasarkan areal potensi, terdapat 28.895 Ha lahan yang dapat dikembangkan untuk perkebunan rakyat di luar 43.554,75 ha lahan yang telah dibudidayakan, sehingga luas lahan perkebunan rakyat keseluruhan akan mencapai 72.549,75 Ha.

Pada sektor pertambangan di Kabupaten Way Kanan memiliki potensi yang cukup baik seperti tambang emas, tambang batu bara, tambang minyak yang merupakan sumber potensial dari Sumatera Selatan, selain itu terdapat tambang golongan C. Potensi tambang yang telah dikembangkan adalah seluas 104.073 ha dengan jumlah cadangan sebesar 106.680.000 m<sup>3</sup> untuk pasir kuarsa, 98.766.000 m<sup>3</sup>

untuk basal, 297.309.000 m<sup>3</sup> untuk pasir 10.636.000 m<sup>3</sup>, dan 6.393.000 m<sup>3</sup> untuk tanah liat.

Kabupaten Way Kanan sebagai bagian dari wilayah Provinsi Lampung yang baru berkembang baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya dan administrasi pemerintahannya kedepan sangat memiliki potensi yang besar dalam mengurus keuangan daerahnya. Kemampuan potensial keuangan daerah ini dapat dilihat dari kemampuan dan kinerja dari Pendapatan Asli Daerah nya (PAD). Potensi ini belum seluruhnya tergali dan masih sangat memerlukan upaya dan kerja keras.

Pada tahun 2007 kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan hanya sekitar 3,04% (Rp.27.255.749.914) dari total penerimaan daerah Kabupaten Way Kanan yaitu sebesar Rp.897.540.200.000. Keadaan ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan masih relatif rendah dan masih sangat memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat melalui bantuan dari Pusat. Dengan potensi dan kekayaan sumber daya alam yang tersedia di Kabupaten Way Kanan idealnya pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dapat mampu menggali dan mengembangkan sumber daya daerah sendiri dan mengurangi ketergantungan keuangan dari luar daerah.

Besarnya pendapatan daerah didalam struktur APBD Kabupaten Way Kanan masih diandalkan sebagai penggerak mesin perekonomian yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Kondisi ini jika dikaitkan dengan

pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan. Dimensi didalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD, dana perimbangan dan penerimaan daerah lainnya. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah sangat perlu diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan mengurangi hasrat sektor swasta untuk berkoprah di dalam melaksanakan penanaman modal untuk berinvestasi.

Dalam menyelenggarakan pembangunan daerah maka pemerintah daerah Way Kanan telah mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan dan secara bertahap akan mampu keluar dari berbagai persoalan yang selama ini dihadapi seperti tingkat pengangguran yang tinggi dan jumlah penduduk miskin. Keadaan dan situasi perekonomian daerah seperti ini yang bersinergi dengan keberhasilan dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan lainnya akan membawa Kabupaten Way Kanan pada kemajuan dan sekaligus mengangkat keadaan masyarakat Kabupaten Way Kanan pada keadaan yang semakin sejahtera.

Kemampuan dan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan yang menggunakan konsep kemandirian keuangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan

terhadap penerimaan Kabupaten Way Kanan, oleh sebab itu diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah baik dilihat dari sisi sumber penerimaan daerah ataupun dari sudut pengeluaran dan belanja daerah.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah dari Target yang telah ditetapkan di Kabupaten Way Kanan Secara lebih jelas perkembangannya dapat dilihat pada Tabel. 1 dibawah ini,

**Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan selama Tahun 2005 – 2009**

Tahun	Target (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	Pencapaian Target (%)
2005	4.756.500.000	5.969.388.851	125,50
2006	7.893.250.000	6.796.847.047	86,11
2007	7.530.750.000	5.487.253.436	72,86
2008	8.991.325.000	15.233.142.793	169,42
2009	15.526.069.468	27.255.749.914	175,55
Rata-rata	8.939.578.894	12.148.476.408	125,89

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan , 2010\*(angka sementara).

Pada periode Tahun 2005-2009 dari Pendapatan Daerah yang terrealisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan mengalami fluktuasi dengan rata-rata 125,89% per tahun, merupakan hasil yang cukup baik bagi Kabupaten Way Kanan. Dengan rata-rata tingkat pertumbuhannya pertahun cukup baik.

Penerimaan Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari kontribusi komponen-komponen yang membentuk pendapatan daerah yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sehingga pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya

baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Way Kanan. Arah pengelolaan Pendapatan daerah Kabupaten Way Kanan akan diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat, pengembangan sektor-sektor unggulan di Kabupaten Way Kanan.

Di era otonomi daerah seluruh Pemerintah Daerah senantiasa berupaya dan berpacu untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan potensi yang ada guna peningkatan pertumbuhan ekonomi khususnya pemerintah daerah Kabupaten Way Kanan.

Tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebenarnya tidak semata-mata untuk meningkatkan *local discretion (local autonomy)*, akan tetapi untuk menambah penerimaan daerah agar mampu menutup *fiscal gap* yang terjadi. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya berupa peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Untuk dapat melihat lebih jelas perkembangan Penerimaan daerah yang bersumber dari PAD dapat dilihat pada Tabel 2.

**Tabel 2. Perkembangan Penerimaan yang Bersumber dari PAD Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2009 (dalam 00)**

Tahun	Total	Pertumbuhan (%)
2005	5.969.388.851	-
2006	6.796.847.047	13,86
2007	5.487.253.436	-19,27
2008	15.233.142.793	177,61
2009	27.255.749.914	78,92
Rata-rata		62,78

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, 2010\*(angka sementara)

Dari Tabel 2 pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2009 sangat berflutuasi. Pertumbuhan yang sangat tinggi nampak pada Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar 177,61 %, keadaan ini sesungguhnya tidak terlepas dari upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan untuk menggali penerimaan daerah dari sektor Laba Usaha Daerah dan penerimaan lain-lain. Penurunan terjadi pada tahun anggaran 2007. Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Way Kanan sebesar 62,78%.

Kemampuan dan kinerja PAD Kabupaten Way Kanan dapat dilihat dengan melihat besarnya kontribusi PAD terhadap APBD kabupaten lain di Propinsi Lampung, Tabel 3 berikut disajikan besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung.

**Tabel 3. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005-2009**

No		Rata-rata Kontribusi PAD 2005-2009 (%)
1	Kota Bandar Lampung	9,65
2	<b>Kab. Way Kanan</b>	<b>1,51</b>
3	Kab. Tulang Bawang	1,91
4	Kab. Tanggamus	2,56
5	Kab. Lam. Timur	2,00
6	Kab. Lam. Utara	2,53
7	Kab. Lam. Tengah	2,42
8	Kab. Lam. Selatan	3,03
9	Kab. Lam. Barat	2,59
10	Kota Metro	5,92
	<b>Rata-rata</b>	<b>3,41</b>

Sumber : BPS Propinsi Lampung, 2010 \* (angka sementara)

Berdasarkan Tabel 3 dapat terlihat bahwa rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Way Kanan adalah terendah jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi total PAD terhadap APBD Kabupaten/Kota se-Propinsi Lampung sebesar 3,41%. Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Way Kanan sebesar 1,51%, besarnya kontribusi PAD tersebut terkecil dari 10 Kabupaten di Propinsi Lampung. Proporsi pendapatan asli daerah, pajak, retribusi, laba usaha dan penerimaan lain-lain dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Proporsi Pendapatan Asli Daerah, Pajak, Retribusi, Laba Usaha dan Penerimaan Lain-lain Kabupaten Way Kanan periode Tahun 2005-2009**

Tahun	PAD (Rp,00)	Pajak	Retribusi	Laba Usaha	Penerimaan Lain-lain
2005	5.969.388.851	2.720.815.901	829.085.750	0	2.419.487.200
2006	6.796.847.047	3.104.787.720	872.728.150	50.000.000	2.769.331.177
2007	5.487.253.436	2.501.141.957	850.144.000	25.000.000	2.110.967.479
2008	15.233.142.793	4.618.118.967	1.386.051.500	216.763.933	9.012.208.393
2009	27.255.749.914	4.743.084.151	2.139.058.116	458.431.000	19.915.176.647
Rata-rata	12.148.476.408	3.537.589.739	1.215.413.503	150.038.987	7.245.434.179

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan, 2010\*(angka sementara).

Proporsi PAD dari Tahun 2005-2009 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata PAD sebesar Rp. 12.148.476.408 penurunan terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 5.487.253.436 , penerimaan pajak daerah kurun waktu tahun 2005-2009 juga mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu dengan rata-rata sebesar Rp. 3.537.589.739 penurunan terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 2.501.141.957. Penerimaan retribusi daerah kurun waktu 2005-2009 mengalami peningkatan yang cukup baik dengan rata-rata Rp.1.215.413.503 . Penerimaan laba usaha daerah mengalami peningkatan yang baik yaitu dengan rata-rata Rp.150.038.987 penurunan juga terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp.25.000.000. Sedangkan besarnya penerimaan lain-lain menunjukkan peningkatan yang baik dengan rata-rata Rp.7.245.434.179.

Dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan subsistem Keuangan Negara dan sekaligus sebagai implikasi pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberian sumber keuangan negara kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka pelaksanaan

Di Era Otonomi Daerah dengan menganut sistem desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan finansial. Untuk program pemerintah pusat melalui dana perimbangan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Daerah atau membantu pendanaan kebutuhan-kebutuhan khusus Daerah tertentu, yang meliputi:

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

Dana Bagi Hasil Pajak (BHP) dan Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah bagi Kabupaten Way Kanan yang berasal dari dana Perimbangan. Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Sumber dana BHP bersumber dari :
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
  - b. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB)
  - c. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Sumber Dana BHBP berasal dari :
  - a. Kehutanan
  - b. Pertambangan Umum
  - c. Perikanan
  - d. Pertambangan Minyak Bumi
  - e. Pertambangan Gas Bumi
  - f. Pertambangan Panas Bumi

Tingginya Kemampuan dan Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari kontribusi PAD terhadap Penerimaan daerah (APBD), karena ciri utama yang menunjukkan daerah mampu melaksanakan otonomi daerah dilihat dari kemampuan keuangan daerahnya. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat diharapkan memiliki

proporsi yang semakin kecil dan melalui peningkatan PAD yang dapat dijadikan bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut (Halim, 2001) secara umum, semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai keperluan daerahnya sendiri akan menunjukkan “kinerja keuangan yang positif”. Dalam hal ini kinerja keuangan yang positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi pada daerah tersebut. Besaran kontribusi PAD terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Way Kanan tahun Anggaran 2005 – 2009 dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Kontribusi PAD Terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2005 – 2009**

Tahun	Total Penerimaan (Rp)	PAD (Rp,00)	Kontribusi (%)
2005	369.876,15	5.969,38	1,61
2006	388.907,59	6.796,84	1,75
2007	449.235,27	5.487,25	1,22
2008	633.598,24	15.233,14	2,40
2009	897.540,20	27.255,74	3,04
Rata-rata			2,00

Sumber : Bagian Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan , 2010\*(angka sementara).

Komposisi perbandingan antara sumber pendapatan daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 telah terjadi pergeseran kontribusi dengan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 2,00%. Jika pada tahun 2005 kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap APBD hanya mencapai 1,61 % pada tahun 2006

mengalami peningkatan 1,75%. Kontribusi Pendapatan Asli daerah terhadap APBD terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 3,04%.

Berdasarkan data tersebut, meskipun kontribusi PAD terhadap APBD semakin meningkat tiap tahunnya namun demikian kontribusi PAD terhadap APBD masih sangat kecil yaitu rata-rata hanya sebesar 2,00%, dan hal ini menunjukkan perlunya menggali potensi daerah yang menjadi sumber penerimaan daerah sehingga dapat memperkuat keuangan daerah dan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk terus menerus meningkatkan penerimaan daerah bersumber dari PAD agar tingkat ketergantungan semakin berkurang.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang kemampuan keuangan daerah di Kabupaten Way Kanan dengan judul ” Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2009 ”.

## **B. Perumusan Masalah**

Sejak diberlakukannya Otonomi daerah sasaran yang diharapkan adalah menjadikan Pemerintah Kabupaten/Kota lebih mandiri yang tercermin pada meningkatnya PAD dan berkurangnya subsidi (*grant*) pusat. Dengan demikian, Kabupaten Way Kanan dituntut untuk mandiri dalam hal keuangan daerah, untuk itu perlu melakukan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan dari Pemerintah Pusat, permasalahan yang ada, adalah :

1. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD masih relatif kecil yaitu rata-rata Rp. 3,5 miliar untuk pajak daerah dan Rp. 1,2 miliar untuk retribusi (Tabel 4).
2. Rata-rata kontribusi PAD Kabupaten Way Kanan terkecil dari 10 Kabupaten yang ada di Propinsi Lampung setelah hanya sebesar 1,51% (Tabel.3).
3. Rata-rata pertumbuhan PAD hanya sebesar 62,78%

Kecilnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, kontribusi PAD Kabupaten Way Kanan terkecil dari 10 Kabupaten serta pertumbuhan PAD yang belum optimal maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  
“Bagaimanakah Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005 sampai dengan 2009 .”

### **C. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui kemampuan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan.
2. Untuk mengetahui kinerja setiap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Way Kanan tahun 2005 – 2009.
3. Untuk menentukan langkah dan kebijakan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan tingkat efektifitas, kontribusi dan pertumbuhan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Daerah Kabupaten Way Kanan merupakan daerah otonom dan sesuai dengan pemberian otonomi kepada daerah yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah dituntut untuk menggali dan meningkatkan sumber-sumber keuangannya dengan memanfaatkan potensi yang ada. Dalam wilayahnya guna mengimbangi kebutuhan pembiayaan daerah. Sejalan dengan tuntutan pembangunan tersebut sesuai dengan kewenangannya sebagai badan publik. Salah satu sumber penerimaan asli daerah yang berasal dari rakyat atau karena memperoleh jasa atau milik pemerintah yang diberikan kepada rakyat adalah penerimaan yang berasal dari retribusi daerah.

Menurut (Halim, 2002), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah

dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah.

Secara teori pengertian kinerja Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan rasio penerimaan daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Secara sederhana, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan beberapa metode sederhana seperti berikut:

- a. Membandingkan rencana program dengan realisasi program.
- b. Membandingkan efisiensi program saat ini dengan program tahun lalu.
- c. *Benchmarking* dengan program Pemerintah Daerah lainnya.
- d. Membandingkan realisasi program dengan standarnya.

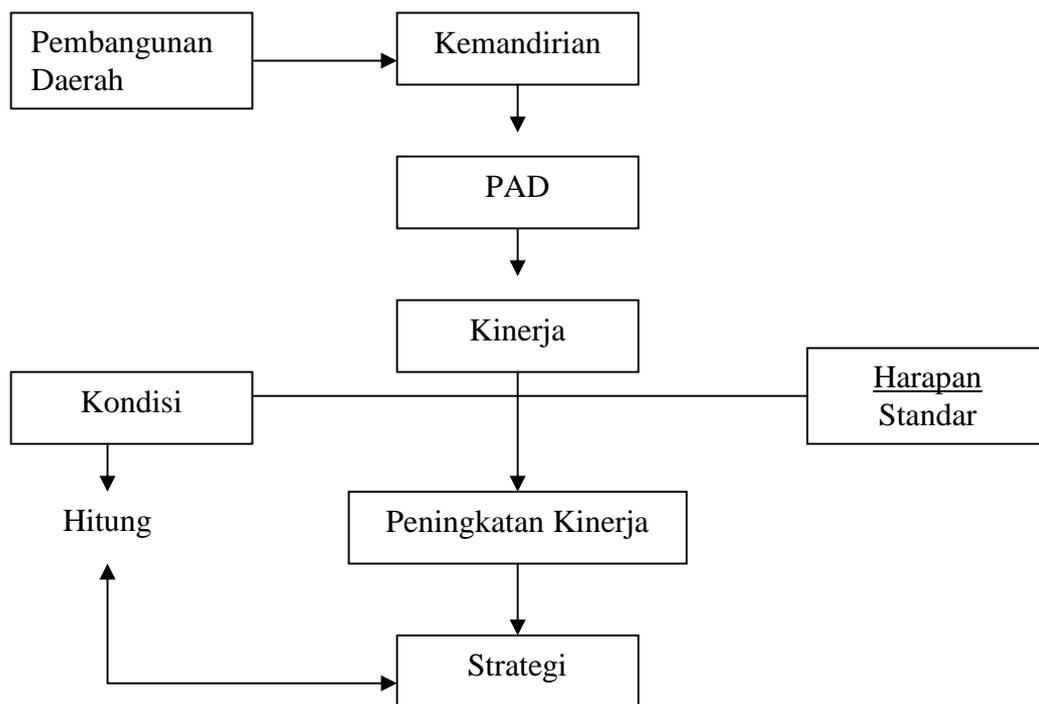
Lebih lanjut Halim, (2002:100) menyebutkan kinerja pendapatan asli daerah adalah suatu cara untuk menentukan tingkat efisiensi, efektifitas dari pencapaian pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kutipan lain yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah haruslah berupaya secara terus menerus menggali dan meningkatkan sumber keuangan sendiri. Salah satu masalah yang dihadapi dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah kelemahan dalam hal pengukuran/penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara berkesinambungan tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dan keadilan.

Pengukuran Kinerja PAD dapat dibagi menjadi :

1. Kemandirian Fiskal merupakan kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi lokal.
2. a. Pertumbuhan PAD yaitu merupakan kemampuan daerah untuk meningkatkan PAD dari waktu ke waktu.  
b. *Share* PAD yaitu kontribusi/sumbangan PAD terhadap APBD  
c. Capaian Target PAD yaitu merupakan kemampuan daerah untuk mengoptimalkan PAD berdasarkan target yang ditetapkan.
3. Proporsionalitas Retribusi dan Pajak Daerah yaitu kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari Retribusi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.
4. Kemampuan Keuangan Daerah yaitu merupakan rata-rata hitung dari Pertumbuhan (*Growth*), Elastisitas, dan *Share*.

Pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan tidak terlepas dari aspek pembiayaan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Besarnya potensi lokal yang tergali dalam bentuk PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain yang sah merupakan cermin kemandirian keuangan suatu daerah. Kemandirian keuangan Kabupaten Way Kanan dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah dalam bentuk pertumbuhan (*growth*), *share* atau perbandingan PAD terhadap APBD dan capaian target PAD. Besarnya hasil penghitungan menunjukkan kondisi kinerja keuangan daerah yang sesungguhnya, kemudian dibandingkan dengan standarisasi atau kaidah-kaidah ukuran yang telah ditetapkan. Hasil observasi menunjukkan rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 62,78%, rata-rata capaian target PAD sebesar 116,63%, kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata

sebesar 2,00% pada tahun anggaran 2003-2007. Kesenjangan atau *gap* antara kondisi kinerja keuangan dengan standar dapat ditetapkan langkah dan strategi-strategi yang dapat digunakan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan uraian tersebut dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran